

Mata Najwa Sebagai Cermin Demokrasi dan Representasi Kebenaran Dalam Media Alternatif

Marip Pasah¹, Angga Sandhika Raharjo², Anisa Almagfira³, Fabhian Halky Syahir⁴, Daffi Allegra Asmara⁵, Joy Catherine Carina T.⁶, Lavia Luky Carolina⁷, Tsabitah Rahmah Adfari⁸, Nayla Putri Abdullah⁹, Natasya Yadila¹⁰, Sabina Putri Amelia¹¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: ¹2210611084@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2210611063@mahasiswa.upnvj.ac.id ³2210611065@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴2210611069@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁵2210611073@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁶2210611076@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁷2210611078@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁸2210611081@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁹2210611091@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹⁰2210611093@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹¹22106110103@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Kajian ini menganalisis narasi presiden melalui perspektif demokrasi deliberatif Habermas dan menilai relasi komunikasi elite-rakyat dalam kebijakan IKN sebagai cerminan kualitas demokrasi partisipatoris di Indonesia. Artikel ini bertujuan mengkaji apakah komunikasi politik elite dapat menjadi indikator dari kualitas demokrasi itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis konten untuk menelaah Mata Najwa sebagai representasi demokrasi dan media alternatif. Data diperoleh dari berbagai sumber media dan referensi akademik, dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan temuan yang relevan, aplikatif, dan kontributif bagi pengembangan wacana media dan demokrasi di Indonesia. Program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab menjadi salah satu sorotan utama dalam lanskap media Indonesia. Dengan rekam jejak sebagai jurnalis independen, program ini konsisten membahas isu politik, sosial, budaya, dan tren masyarakat melalui pendekatan kritis, reflektif, dan kredibel. Setiap tayangan menghadirkan narasumber berkompeten serta berbagai perspektif, sehingga membuka ruang dialog yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga edukasi, sekaligus meningkatkan kepuasan dan wawasan publik. Podcast Mata Najwa memainkan peran strategis dalam membangun ruang diskusi politik terbuka di Indonesia. Melalui episode “[Eksklusif] Jokowi Soal IKN, Gibran, dan ‘Adili Jokowi’”, program ini menghadirkan Presiden Jokowi untuk menanggapi isu politik, kritik publik, dan kebijakan nasional. Tayangan ini merefleksikan nilai-nilai bela negara, kepemimpinan etis, serta keberanian politik dalam menghadapi tantangan.

Abstract *This study analyzes the president’s narrative through Habermas’ deliberative democracy framework and assesses the communication relations between the elite and the public within the IKN policy as a reflection of the quality of participatory democracy in Indonesia. The article aims to examine whether elite political communication can serve as an indicator of the overall quality of democracy itself. The research method employed is qualitative content analysis, examining Mata Najwa as a representation of democracy and an alternative media platform. Data were gathered from various media sources and academic references, and analyzed comprehensively to produce findings that are relevant, applicable, and contributive to the development of media and democracy discourse in Indonesia. Mata Najwa, hosted by Najwa Shihab, has become one of the most notable highlights within Indonesia’s media landscape. With a track record as an independent journalist, the program consistently discusses political, social, cultural, and societal issues through a critical, reflective, and credible approach. Each broadcast presents competent speakers and multiple perspectives, creating a comprehensive dialogic space. This approach not only provides information but also education, while enhancing public satisfaction and awareness. The Mata Najwa podcast plays a strategic role in fostering an open political discussion space in Indonesia. Through the episode “[Exclusive] Jokowi on IKN, Gibran, and ‘Put Jokowi on Trial’”, the program invited President Jokowi to respond to political issues, public criticisms, and national policies. This broadcast reflects values of national defense, ethical leadership, and political courage in facing contemporary challenges.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Partisipasi politik, Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Komunikasi politik elite, Mata Najwa

Keywords:

Political participation, National Capital Relocation (IKN), Elite political communication, Mata Najwa



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Partisipasi politik warga negara merupakan pondasi utama dalam sistem demokrasi yang sehat, bukan hanya dalam bentuk keikutsertaan pada pemilu, tetapi juga dalam keterlibatan yang bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan politik, terutama ketika negara menetapkan kebijakan berskala besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Sayangnya, di Indonesia, partisipasi politik sering kali masih bersifat prosedural dan elitis, terbatas pada ruang-ruang formal seperti pemilihan legislatif atau konsultasi simbolik yang tidak benar-benar mencerminkan kehendak publik. Dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab di program Mata Najwa, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukan merupakan inisiatif pribadi presiden, melainkan hasil keputusan politik yang telah disetujui oleh DPR. Ia menegaskan bahwa proyek IKN merupakan mandat konstitusional yang sah karena telah melalui proses legislasi di parlemen. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan penting tentang makna representasi dan sejauh mana keputusan yang formal tersebut mencerminkan keinginan rakyat yang terdampak. Dalam perspektif demokrasi deliberatif sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas, legitimasi sebuah kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan legalitas prosedural, tetapi juga harus melalui proses diskursif yang terbuka dan inklusif, di mana warga negara diberi ruang untuk menyuarakan pandangan mereka secara kritis dan didengar secara bermakna.

Partisipasi warga dalam demokrasi bukan semata-mata soal keikutsertaan dalam pemilu, melainkan juga tentang akses terhadap proses deliberasi publik, transparansi informasi, dan peluang yang setara dalam mempengaruhi kebijakan. Dalam studi Siti Zuhro berjudul *Partisipasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, ia menyebut bahwa demokrasi kita masih didominasi oleh “partisipasi prosedural” yang kering dari dialog publik dan cenderung elitis. Wacana yang dibangun Presiden Jokowi dalam wawancara tersebut tampak lebih menekankan legitimasi formal, yakni telah disetujui oleh DPR dan telah dianggarkan dalam APBN, dibandingkan mengulas keterlibatan publik atau konsultasi dengan masyarakat terdampak. Hal ini tentu relevan dikaitkan dengan teori deliberative democracy dari Jürgen Habermas yang menekankan bahwa legitimasi demokratis bukan hanya soal hasil formal, tetapi proses dialog publik yang inklusif. Saat Jokowi berkata “Saya jalanin saja tugas yang diberikan oleh konstitusi”, tampak ada pergeseran dari akuntabilitas horizontal ke arah akuntabilitas vertikal yang sentralistik.

Berbagai kajian telah membahas kritik terhadap proyek IKN, namun belum banyak yang secara spesifik mengaitkannya dengan komunikasi politik elite dan refleksi hak-hak warga negara. Dalam artikel “Pemindahan Ibu Kota Negara dan Tantangan Demokrasi Substansial” oleh Syaiful Huda (2021), disebutkan bahwa proses pemindahan IKN sarat dengan “minimnya pelibatan warga sipil, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang akan terdampak langsung”. Sementara itu, Rachmat Subagya (2020) dalam *Tata Kelola Pemerintahan dan Hak Politik Warga Negara* menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan bermakna sebagai fondasi kebijakan yang demokratis dan berkelanjutan. Wawancara presiden seharusnya tidak hanya menjadi forum klarifikasi politik, melainkan ruang untuk menunjukkan keterbukaan dan dialog dua arah. Namun dalam tayangan tersebut, warga seolah menjadi penonton pasif dari narasi besar negara. Di sinilah tampak bagaimana relasi antara elite dan rakyat dalam kebijakan IKN masih dibingkai dalam logika top-down, bukan bottom-up.

Melalui pendekatan analisis naratif dan kajian literatur, tulisan ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana wawancara Presiden Joko Widodo mencerminkan dinamika kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) dalam konteks partisipasi politik dan hak warga negara di Indonesia? dan (2) Bagaimana wawancara ini menggambarkan peran warga negara dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan politik terkait kebijakan pemerintah? Dengan membedah narasi presiden dan menempatkannya dalam konteks demokrasi partisipatoris, tulisan ini ingin mengkaji apakah komunikasi politik elite dapat menjadi indikator dari kualitas demokrasi itu sendiri. Sebab dalam negara demokratis, keterlibatan warga tidak boleh berhenti di kotak suara lima tahunan, tetapi harus terjaga

dalam setiap kebijakan strategis negara. Proyek IKN bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga tentang konstruksi sosial atas relasi negara-warga, representasi politik, dan hak untuk didengar. Kajian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam memperkuat wacana akuntabilitas publik dan memperluas perspektif mengenai peran komunikasi elite dalam demokrasi Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam Artikel Ilmiah ini berfokus pada analisis Mata Najwa Sebagai Cermin Demokrasi Dan Representasi Kebenaran Dalam Media Alternatif, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*) atau analisis isi. Metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*) atau analisis isi merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan analisis mendalam, mengumpulkan dan menginterpretasikan melalui berbagai sumber akademik, seperti media massa, audio, text, atau gambar, atau media lainnya yang berisikan informasi relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada pendapat subjektif, tetapi juga berdasarkan referensi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas, menawarkan solusi yang aplikatif, serta berkontribusi dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Program “Mata Najwa” yang dipandu oleh tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat: Najwa Shihab, di kanal YouTube miliknya sangat menjadi sorotan utama masyarakat dalam lanskap media Indonesia. Najwa Shihab dengan rekam jejak panjang sebagai jurnalis independen yang terkenal dengan kritik-kritik tajamnya terhadap pemerintahan Indonesia, dapat membawa program ini secara konsisten membahas isu-isu politik, sosial, budaya, dan tren-tren masyarakat saat ini, tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengedukasi masyarakat dengan pendekatan kritis, reflektif, kredibel, dan terstruktur, dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kredibilitas di masing-masing topik yang diangkat dalam setiap tayangannya.

Mata Najwa sudah tidak asing di telinga masyarakat, pembahasan dalam setiap tayangannya juga menekankan pada aspek keberimbangan dengan membahas isu dari berbagai perspektif. Dalam berbagai episode, bahkan banyak narasumber yang memiliki pandangan berseberangan dengan perspektif umum sehingga dapat membuka ruang dialog yang lebih komprehensif dan kompleks. Pendekatan ini menjadi sebuah keunggulan bagi Mata Najwa karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu yang dibahas sehingga membuat masyarakat mendapatkan wawasan baru dan secara tidak langsung memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang menyaksikan.

Tabel 1. Aspek penilaian setiap episode

Anies Baswedan dan Drama Pilkada Mata Najwa	Host menunjukkan pemahaman mendalam tentang konteks politik Indonesia khususnya dinamika Pilkada dalam perjalanan politik narasumber.	Narasumber menunjukkan pemahamannya yang mendalam mengenai dinamika politik nasional khususnya yang berkaitan dengan proses Pilkada Jakarta.	Host mampu menjaga keseimbangan pembahasan. misalnya saat membahas pencapaian Ani sebagai gubernur DKI Jakarta house tidak hanya menanyakan keberhasilan tetapi juga meminta	Podcast ini sangat berhasil menyajikan wawasan baru kepada penonton melalui pembahasan yang mendalam dan komprehensif tentang dinamika politik pada saat Anies	Narasumber menjelaskan dengan detail bagaimana dinamika kepentingan terhadap politik mempengaruhi dukungan terhadap Anies sesuatu yang jarang diungkapkan dalam pemberitaan	Dalam hal ketahanan dan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks narasi tentang bagaimana seorang tokoh dengan latar belakang akademisi dapat

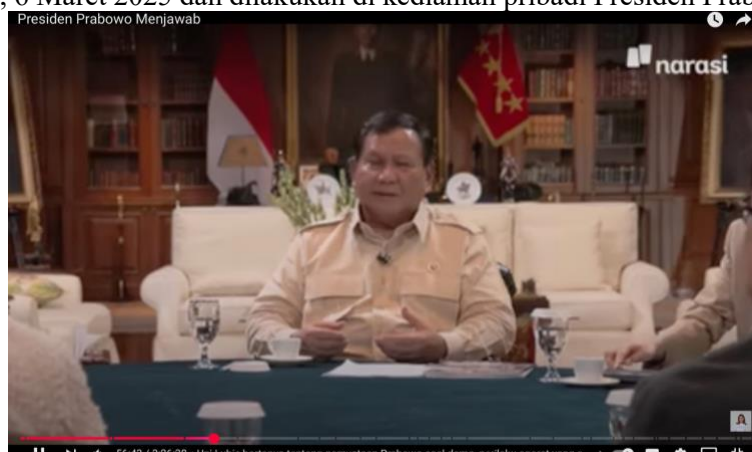
			narasumber untuk mengevaluasi terhadap kebijakan-kebijakannya pada saat menjabat.	Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI dan pada Pilkada 2024.	mainstream. Selain itu pada podcast ini juga menjadi analisis mendalam tentang faktor-faktor sosiologis dan demografis yang mempengaruhi peta dukungan terhadap panas di berbagai wilayah di Indonesia pada saat Pilkada Jakarta saat itu.	bernavigasi dalam arena politik praktis memberikan inspirasi bahwa latar belakang yang beragam dapat berkontribusi positif dalam kepemimpinan publik.
Judul Podcast : Ngobrolin Kebocoran Data, Gaya Hedon Polisi, Pro Kontra BBM Naik Musyawarah	Host sangat memiliki kompetensi dalam pembahasan diskusi pada podcast kali ini mengenai kebocoran data gaya hedon polisi dan kenaikan harga BBM dengan penjelasan yang terstruktur dan kaya akan informasi harus juga memiliki latar belakang jurnalistik yang sudah tidak perlu dilakukan lagi sehingga dapat membawa diskusi ini menjadi lebih substantif dengan kompetensi yang dimiliki host.	Narasumber dalam podcast ini sangat memiliki kompetensi dalam diskusi di podcast kali ini.	Host dan para narasumber sangat aktif dan informatif dalam pembawaan diskusi pada podcast ini.	Topik yang dibahas juga merupakan isu hangat yang sedang dibicarakan dalam masyarakat sehingga masyarakat cukup mendapatkan wawasan baru dalam isu yang sedang dibahas tersebut.	karena itu yang dibahas tersebut merupakan isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat tentu sangat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang memang sangat penasaran dengan topik yang dibahas.	Dari informasi-informasi dan fakta-fakta terbaru yang dipaparkan oleh narasumber tentu secara tidak langsung juga memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk bisa menelaah dan memilah tentang narasi pasal mana yang baik dan mana yang kurang baik dalam RKUHP yang sedang dibahas.
Retno Marsudi dan Sri Mulyani: Women In Power	Host menunjukkan pemahaman yang baik tentang peran Perempuan dalam politik dan pemerintahan, serta tantangannya dalam mengatasi stereotip gender.	Narasumber yang diundang adalah Wanita-wanita yang pernah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, dan tentu sangat memahami bagaimana tantangan yang dihadapi sebagai	Host berhasil menjaga keseimbangan diskusi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap narasumber untuk menyampaikan pandangannya. Host juga menambahkan	Diskusi dalam podcast membawa wawasan baru tentang tantangan dan pencapaian sebagai Perempuan di posisi kekuasaan, menyoroti kekuasaan Perempuan	Topik yang disajikan sangat menyoroti permasalahan ketertarikan kesetaraan gender khususnya dalam pemerintahan. Topik tersebut sangat baik bagi seluruh Perempuan yang	Pembahasan yang diangkat cukup menginspirasi penonton, karena dapat mengubah stigma Masyarakat tentang Perempuan tidak perlu memiliki karier yang

		wanita dalam kekuasaan.	perspektif yang berbeda untuk memperkaya diskusi.	dalam menghadapi situasi sulit. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya ketahanan dan dukungan dalam menjalankan peran mereka di pemerintahan.	ingin berkarier dan memiliki jabatan yang tinggi.	bagus. Dengan pengalaman dari para narasumber yang keduanya pernah memiliki jabatan yang tinggi tentunya memberikan motivasi untuk pemirsa khususnya tentang pemberdayaan Perempuan.
Ahok Soal Jokowi, Prabowo, dan Jakarta Hari Ini	Host menunjukkan pemahaman yang baik tentang tantangan politik dan sosial yang dihadapi. Dengan mengkritisi isu seperti korupsi, dinasti politik, dan kebijakan publik yang kurang efektif.	Narasumber yang diundang adalah seseorang yang pernah menduduki kekuasaan di pemerintahan sebagai Gubernur Ibu Kota. Narasumber mampu mengemukakan pandangannya tentang kebijakan politik di Indonesia saat ini.	Host berhasil menjaga keseimbangan diskusi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada narasumber untuk menyampaikan pandangannya. Host juga menambahkan perspektif yang berbeda untuk memperkaya diskusi.	Diskusi dalam podcast membawa wawasan baru tentang tantangan dan pencapaian sebagai Perempuan di posisi kekuasaan, menyoroti kekuasaan Perempuan dalam menghadapi situasi sulit. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya ketahanan dan dukungan dalam menjalankan peran mereka di pemerintahan.	Topik yang disajikan memberikan wawasan baru tentang dinamika politik di Jakarta, termasuk tantangan dalam berpolitik, serta kebijakan pemerintahan saat ini yang berpengaruh langsung dengan masyarakat.	Pembahasan yang diangkat cukup menginspirasi penonton, karena dapat memberikan inspirasi tentang kepemimpinan, serta pentingnya keseimbangan antara uang dan waktu.
Erdogan Soal Indonesia, Palestina, dan Trump	Host menunjukkan pemahaman yang baik tentang hubungan diplomatik dan perdamaian dunia, serta perdagangan internasional dan pertahanan.	Narasumber yang diundang adalah seorang presiden dari sebuah negara yang sangat berperan penting dalam perdamaian dunia.	Host berhasil menjaga keseimbangan diskusi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap narasumber untuk menyampaikan pandangannya. Host juga menambahkan perspektif yang berbeda untuk memperkaya diskusi.	Diskusi dalam podcast membawa wawasan baru tentang tantangan dalam perdagangan dan perdamaian dunia, serta isu tentang konflik internasional yang mengganggu perdamaian dunia.	Topik yang disajikan sangat menyoroti permasalahan tentang politik antara Turki dan Indonesia yang semakin menguat di era saat ini, sehingga memberikan dampak baik secara tidak langsung dengan kestabilan ekonomi di Indonesia.	Pembahasan yang diangkat cukup menginspirasi penonton, karena penonton dapat mendapatkan contoh yang baik dari cara kepemimpinan presiden Erdogan.

Siapa Rindu Soeharto	kemampuan jurnalis seorang Najwa tidak diragukan lagi. Ia kemampuan wawancara yang tajam, terbukti dari cara dia menggali berbagai pandangan Tommy Soeharto tentang masa lalu Orde Baru, kepemimpinan ayahnya, serta upaya keluarga Soeharto untuk kembali berpolitik melalui Partai Berkarya.	Tommy Soeharto sebagai narasumber dalam episode <i>Mata Najwa</i> berjudul “Siapa Rindu Soeharto” tampaknya mampu memberikan jawaban yang cukup baik, meskipun beberapa kali pernyataannya terasa lebih mengarah pada membela keluarga dan membangun citra positif.	Di video ini, Najwa menyisipkan pertanyaan tentang perspektif generasi Z dan bagaimana mereka melihat masa lalu Orde Baru, memberikan porsi yang adil bagi pandangan yang lebih kritis terhadap keluarga Soeharto dan Orde Baru.	anak dari Soeharto melihat kembali era Orde Baru yang dipimpin oleh ayahnya. Banyak orang memiliki pandangan yang sangat kritis dan negatif terhadap pemerintahan Soeharto karena pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarianisme. Namun, Tommy mencoba memberikan narasi positif mengenai masa itu, seperti pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.	video ini menunjukkan bagaimana politik Indonesia saat ini terkoneksi dengan masa lalu dan bagaimana warisan Soeharto mungkin masih memengaruhi dinamika politik di masa depan.	ini memberi pelajaran pentingnya dialog terbuka dan pembelajaran sejarah yang lebih seimbang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai sejarah bangsa ini.
Putusan MK: Motifnya untuk Melayani Gibran Mata Najwa	Dalam podcast ini, ia tidak hanya mengajukan pertanyaan yang tajam dan kritis, tetapi juga mampu menggali lebih dalam terkait substansi Putusan MK yang mempermudah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.	Narasumber yang dihadirkan memiliki latar belakang yang sesuai, baik dari aspek hukum maupun politik. Namun, ada kecenderungan bahwa beberapa narasumber lebih cenderung memberikan perspektif kritis terhadap keputusan MK dibandingkan menghadirkan perwakilan yang membela keputusan tersebut. Meskipun demikian, narasumber tetap memberikan	Najwa Shihab berusaha menghadirkan sudut pandang yang beragam, namun terdapat kecenderungan lebih banyak mengarah ke kritik terhadap Putusan MK.	Podcast ini berhasil mengedukasi masyarakat tentang implikasi hukum dan politik dari Putusan MK. Penjelasan yang diberikan oleh host dan narasumber mampu menjelaskan aspek teknis hukum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.	Podcast ini memberikan informasi yang relevan dengan situasi politik nasional, terutama bagi pemirsa yang ingin memahami lebih dalam mengenai peran MK dan dampak keputusannya terhadap Pemilu 2024.	Meskipun topik ini memberikan banyak wawasan baru, aspek inspiratif dalam diskusi ini kurang terlihat. Fokus utama lebih pada kritik terhadap kebijakan dan keputusan hukum daripada bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawal demokrasi

		analisis berbasis hukum dan politik logis serta faktual.				dan hukum di Indonesia.
Menuju Akhir Sengketa Pilpres Musyawarah	Najwa Shihab, Jovial dan Andovi selaku host memiliki kompetensi dalam pembahasan tentang Menuju Akhir Sengketa Pilpres Musyawarah, yang mana hal ini didasarkan pada penyampaian argumentasi dan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber telah jelas dengan dikemas oleh data dan fakta yang terjadi serta tidak menghilangkan sudut pandang yang ob	Narasumber yang ada pada podcast ini adalah Ari Yusuf Amir selaku ketua tim hukum nasional AMIN, Fahri Bachmid selaku wakil ketua tim pembela Prabowo Gibran, Todung Mulya Lubis selaku ketua deputi hukum TPN Ganjar Mahfud.	Najwa Shihab, Jovial, dan Andovi mampu membuat perbincangan antara host dengan narasumber berlangsung dengan baik dan berimbang hal ini dikarenakan host selalu menanyakan pendapat dari narasumber guna mengetahui adanya pendapat lain dan alur pembicaraan pun berjalan dengan lancar dan ke-6 pembicara dalam podcast ini memiliki kapabilitas yang sesuai.	Tentunya podcast ini berisikan tentang informasi baru yaitu Bagaimana keadaan yang sesungguhnya terkait sah atau tidaknya Permasalahan hasil sengketa suara pemilu yang diajukan oleh para penonton.	Sangat dibutuhkan karena informasi yang diberikan ada sesuatu yang sebenarnya terjadi pada saat pilpres, dan mekanisme pelaksanaannya dijelaskan dengan sangat detail.	Sangat menginspirasi untuk menjadi seorang ahli hukum yang dapat memberikan pemahaman nya terkait hukum kepada publik.

Tabel di atas merupakan hasil penilaian podcast pada Channel YouTube Najwa Shihab yang sudah tidak diragukan lagi mengenai kredibilitas dan informasi faktual yang diberikan. Salah satu contohnya yaitu tayangan yang berjudul “Presiden Prabowo Menjawab”. Wawancara ini ditayangkan pada Hari Minggu, 6 Maret 2025 dan dilakukan di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang.



Gambar 1. Presiden Prabowo Menjawab
 Sumber: (YouTube - Mata Najwa, 2025)

Para Host, Moderator, sangat kompeten dalam membawa obrolan menjadi lebih menarik dan eksklusif melalui wawancara yang mendalam dan sangat komprehensif. Narasumber, yang merupakan seorang presiden juga sangat tenang dalam menjawab dan menjabarkan setiap pertanyaan dari moderator. Menghasilkan diskusi yang sangat kompleks dan menjawab setiap pertanyaan masyarakat

Indonesia yang dijembatani oleh para Jurnalis tersebut mengenai antaranya UU TNI, RUU Polri, IHSG, hingga pemberlakuan tarif dagang baru dari AS, dll.

Program "Mata Najwa" di YouTube menjadi contoh nyata bagaimana jurnalisme adaptif dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran publik. Di era digital saat ini, di mana disinformasi dan hoaks beredar luas, kehadiran tayangan seperti "Mata Najwa" menjadi sangat penting. Platform YouTube tidak hanya menjadi sarana distribusi, tetapi juga menjadi medium reflektif yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan partisipasi warga negara. Dengan demikian, sumber tayangan "Mata Najwa" di YouTube bukan hanya bentuk modernisasi media, tetapi juga upaya strategis dalam memperluas jangkauan pendidikan publik melalui pendekatan media yang mudah diakses dan bernilai tinggi.

2. Pembahasan

Nilai-nilai Bela Negara, Politik, dan Kepemimpinan yang terkandung dalam tayangan program Podcast "Mata Najwa" Episode [EKSKLUSIF] Jokowi Soal IKN, Gibran, dan "Adili Jokowi" dalam meningkatkan partisipasi politik dan menjamin hak warga negara

Di tengah dinamika politik nasional dan perkembangan media digital, tayangan seperti podcast "Mata Najwa" telah mengambil peran strategis sebagai ruang diskursif yang mampu menyampaikan isu-isu kenegaraan secara langsung, terbuka, dan edukatif. Salah satu episode yang menyita perhatian publik adalah episode "[Eksklusif] Jokowi Soal IKN, Gibran, dan 'Adili Jokowi'", di mana Presiden Joko Widodo secara terbuka menjawab berbagai pertanyaan terkait proyek strategis nasional, kontestasi politik, dan kritik terhadap kepemimpinannya. Melalui episode ini, tampak jelas bahwa media bukan hanya sarana hiburan atau informasi semata, tetapi juga menjadi medium penting dalam membentuk kesadaran politik, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter kepemimpinan yang akuntabel. Penampilan Presiden Jokowi dalam program ini mencerminkan beberapa nilai bela negara serta prinsip kepemimpinan demokratis yang relevan dengan tantangan bangsa saat ini.

1. Cinta Tanah Air dan Komitmen terhadap Pembangunan Nasional

Presiden Joko Widodo dalam wawancara tersebut menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bukanlah semata-mata proyek infrastruktur, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan simbol transformasi Indonesia sebagai negara maju. Gagasan ini tidak hanya mencerminkan visi politik, tetapi juga semangat bela negara dalam bentuk kerja nyata untuk masa depan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bela negara tidak terbatas pada pertahanan fisik, tetapi juga mencakup partisipasi dalam pembangunan nasional¹. Dalam konteks ini, pembangunan IKN dapat dipandang sebagai bagian dari aktualisasi cinta tanah air yang ditujukan untuk memperkuat identitas nasional, kemandirian wilayah, dan keadilan spasial antarwilayah di Indonesia.

2. Demokrasi, Kritik, dan Kesadaran Berbangsa

Dalam sesi tanya jawab, Najwa Shihab menyoroti berbagai kritik masyarakat terhadap Presiden, termasuk tuduhan bahwa Jokowi tidak netral dalam Pemilu 2024 serta keterlibatan anaknya dalam kontestasi politik. Jokowi menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Ia menolak anggapan bahwa dirinya memanipulasi sistem, dan menekankan pentingnya menjaga demokrasi. Sikap ini mencerminkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana keterbukaan terhadap kritik menjadi elemen penting dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks bela negara, sikap menerima kritik dan transparan terhadap publik adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional seorang pemimpin². Dialog terbuka yang dibangun dalam podcast ini memberikan ruang pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat.

3. Keteladanan Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Moral

¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

² Arief T. Surowidjojo, *Hukum, Demokrasi dan Etika, Lentera Menuju Perubahan, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm. 42.

Jokowi juga menunjukkan tanggung jawab moral sebagai pemimpin dengan menjelaskan latar belakang kebijakan-kebijakan besar yang dijalankan pemerintah, termasuk strategi pembangunan jangka panjang dan prioritas nasional. Ia menyatakan bahwa segala keputusan diambil melalui pertimbangan menyeluruh dan untuk kepentingan rakyat. Nilai tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan etis (ethical leadership), di mana pemimpin tidak hanya bertindak berdasarkan legalitas, tetapi juga pada prinsip-prinsip moral dan etika publik. Keteladanan pemimpin menjadi elemen penting dalam bela negara, karena hanya dengan kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab, masyarakat dapat diarahkan untuk mencintai dan membangun bangsanya secara berkelanjutan.

4. Keberanian Politik dalam Menjawab Tantangan

Dalam podcast tersebut, Presiden tidak menghindari dari pertanyaan-pertanyaan sensitif, seperti dugaan bahwa ia menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan dinasti politik. Ia mengklarifikasi bahwa semua proses politik harus tunduk pada aturan hukum dan bahwa ia tidak mencampuri urusan Komisi Pemilihan Umum maupun Mahkamah Konstitusi. Sikap ini menunjukkan keberanian politik yang menjadi bagian dari kepemimpinan nasional yang kuat. Dalam perspektif bela negara, keberanian mengambil sikap dan menjawab tantangan politik merupakan cerminan dari kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap rakyat dan negara³. Bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga soal komitmen terhadap prinsip keadilan dan integritas konstitusional.

5. Media sebagai Sarana Edukasi Politik dan Literasi Kebangsaan

Episode ini juga memperlihatkan bagaimana media dapat memainkan peran penting dalam membentuk literasi politik masyarakat. Gaya bertanya kritis dari Najwa Shihab dan jawaban terbuka dari Presiden menunjukkan bahwa komunikasi politik bisa berlangsung dalam format yang edukatif, informatif, dan tetap menjaga etika dialog⁴. Penggunaan media populer seperti podcast untuk menyampaikan isu-isu besar kenegaraan menunjukkan bahwa nilai-nilai bela negara dan kepemimpinan tidak harus disampaikan secara formalistik atau kaku. Sebaliknya, format yang lebih ringan dan populer justru menjangkau publik yang lebih luas, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan medium digital.

Tayangan podcast “Mata Najwa” episode “[Eksklusif] Jokowi Soal IKN, Gibran, dan ‘Adili Jokowi’” menunjukkan bahwa media dapat menjadi ruang pembelajaran yang efektif tentang nilai-nilai bela negara, kepemimpinan, dan demokrasi, bukan hanya menyuguhkan wawasan politik kontemporer. Dengan memanfaatkan format dialogis yang terbuka dan kritis, episode ini membuktikan bahwa media dapat menjadi instrumen strategis dalam pembentukan karakter kebangsaan. Melalui kehadiran langsung Presiden Jokowi dalam menjawab isu-isu penting bangsa, publik tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mendapatkan contoh konkret tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap dalam menghadapi kritik, mengambil keputusan strategis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi.

Dengan demikian, media bukan hanya sarana informasi, melainkan juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan karakter bangsa. Tayangan seperti ini sangat penting dalam membangun kesadaran politik dan nasionalisme yang kritis di tengah tantangan zaman. Harapannya, perbincangan semacam ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari literasi politik masyarakat, guna menciptakan warga negara yang berintegritas, kritis, dan mencintai tanah air secara cerdas.

Penguatan Peran Warga Negara dalam Penegakan Nilai Bela Negara, Politik, dan Kepemimpinan melalui tayangan program Podcast “Mata Najwa” Episode [EKSKLUSIF] Jokowi Soal IKN, Gibran, dan “Adili Jokowi”

Podcast “Mata Najwa” episode [EKSKLUSIF] Jokowi Soal IKN, Gibran, dan “Adili Jokowi” menghadirkan pendekatan yang unik dan efektif sebagai sarana edukatif dalam membangun kesadaran kebangsaan serta memperkuat penegakan nilai bela negara, politik, dan kepemimpinan. Melalui dialog

³ Darji Darmodiharjo dkk., *Santiaji Pancasila, Laboratorium Pancasila*, (Surabaya: IKIP Malang, Oktober 1979), hlm. 140–144.

⁴ Saragih, R. dan S. A. (2017). *Peran Komunikasi Politik Pemerintahan Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana desa*. REFORMASI, 7(1), 59–69.

antara Najwa Shihab dan Presiden Joko Widodo, publik diajak menyelami berbagai isu strategis nasional dalam format yang inklusif, informatif, dan komunikatif. Tayangan ini menegaskan bahwa media populer seperti podcast memiliki potensi besar untuk mendekatkan masyarakat pada nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara.

Konsep bela negara di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan diperinci dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tayangan “Mata Najwa” mengaktualisasikan nilai-nilai ini melalui penyampaian informasi terkait kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta melalui wacana evaluatif terhadap praktik politik dinasti dan kepemimpinan. Narasi yang dibangun menyoroti pentingnya tanggung jawab politik, integritas pemimpin, dan transparansi sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

Podcast ini juga mencerminkan strategi internalisasi nilai bela negara melalui pendekatan komunikasi publik yang interaktif dan reflektif. Penayangan episode ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, dimana perilaku dan nilai dapat dibentuk melalui pengamatan terhadap figur publik yang dijadikan role model. Dalam hal ini, Presiden Jokowi sebagai tokoh utama menyampaikan visi, argumentasi, dan tanggapan atas berbagai kritik publik dengan cara yang dapat dipelajari oleh masyarakat, terutama generasi muda. Model komunikasi ini memperkuat nilai kepemimpinan demokratis dan responsif sebagai bagian dari semangat bela negara non-militer.⁵

Strategi kedua yang tercermin dalam tayangan ini adalah kolaborasi multipihak dalam mengedukasi publik. Kehadiran media independen seperti “Mata Najwa” yang konsisten mengangkat tema-tema kebangsaan merupakan wujud nyata kerjasama antara jurnalisme kritis dan kepemimpinan pemerintahan dalam membangun narasi kolektif mengenai arah bangsa. Upaya ini selaras dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengedepankan peran semua pihak, termasuk media massa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk pembinaan karakter bangsa.⁶

Strategi ketiga adalah adaptasi nilai bela negara dan kepemimpinan dalam konteks digital. Format podcast video yang disiarkan melalui kanal YouTube dan platform digital lainnya menjadi media yang efektif dalam menjangkau audiens luas, lintas usia dan latar belakang. Tayangan ini menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sarana yang kuat dalam mendiseminasi nilai-nilai konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sejalan dengan semangat Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta amanat UU ITE, di mana kesadaran digital merupakan bagian dari kedaulatan dan bela negara di era teknologi informasi.

Selanjutnya, penting untuk melakukan evaluasi terhadap dampak media terhadap pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan. Tayangan seperti “Mata Najwa” dapat menjadi objek penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam mengukur peningkatan literasi politik, sikap nasionalisme, dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian semacam ini perlu dikembangkan oleh akademisi dan lembaga riset independen untuk menilai efektivitas media populer dalam membangun civic engagement dan partisipasi publik terhadap isu-isu strategis bangsa.

Dari sisi yuridis, penggunaan media podcast dalam penyebarluasan nilai bela negara, politik, dan kepemimpinan perlu didukung oleh regulasi yang relevan. Hingga saat ini, regulasi yang secara khusus mengatur insentif terhadap konten edukatif bermuatan kebangsaan masih sangat terbatas. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendorong produksi konten bernuansa kebangsaan melalui sinergi antar kementerian, insentif fiskal, dan perlindungan hukum terhadap media independen. Rujukan terhadap PP No. 45 Tahun 2019 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dapat dijadikan dasar dalam menyusun regulasi konten digital yang mencerminkan nilai Pancasila dan UUD 1945.

Implikasi hukum lainnya adalah pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara sektor media, pendidikan, dan pertahanan dalam konteks bela negara digital. Sinkronisasi ini dibutuhkan untuk mencegah disharmoni kebijakan serta memastikan bahwa pesan kebangsaan yang

⁵ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977).

⁶ Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Karakter dalam Kepemimpinan Nasional* (Jakarta: Gramedia, 2010).

disampaikan melalui media populer tidak terjebak dalam bias politik atau kepentingan pragmatis. Perlindungan terhadap konten orisinal, termasuk tayangan podcast bernilai edukatif, juga harus diperkuat melalui mekanisme hak kekayaan intelektual dan regulasi anti-hoaks.

Sebagai penutup, optimalisasi penegakan nilai bela negara, politik, dan kepemimpinan melalui tayangan podcast seperti “Mata Najwa” merupakan inovasi strategis dalam komunikasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan memanfaatkan format yang akrab dan diterima masyarakat, tayangan ini menjadi wahana edukatif yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa. Media seperti ini merepresentasikan soft power dalam penguatan karakter bangsa, sekaligus menjadi jembatan antara norma hukum dan kesadaran publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tayangan wawancara Presiden Joko Widodo dalam program *Mata Najwa*, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik yang disampaikan oleh elite negara masih sangat berpusat pada pendekatan formalistik dan legalistik, alih-alih mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pada keterlibatan aktif dan bermakna dari masyarakat. Narasi yang dibangun Presiden lebih banyak menekankan bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah hasil keputusan politik yang sah karena telah disahkan oleh DPR, tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana proses partisipasi publik dijalankan sebelum kebijakan tersebut diputuskan. Padahal, dalam demokrasi substansial, partisipasi warga tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk keterwakilan legislatif semata, tetapi juga harus mencakup dialog publik yang terbuka, keterlibatan masyarakat terdampak, dan transparansi kebijakan. Dalam wawancara ini, posisi warga negara tampak direduksi menjadi sekadar objek dari kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, representasi politik masih belum sepenuhnya berakar pada prinsip partisipasi horizontal yang inklusif dan egaliter. Melalui pendekatan teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, dapat disimpulkan bahwa kualitas komunikasi politik dalam konteks kebijakan IKN belum memenuhi standar legitimasi deliberatif. Narasi negara yang dominan dan minimnya ruang dialog mengindikasikan bahwa praktik komunikasi elite masih cenderung top-down dan kurang membuka ruang partisipatif. Hal ini tentu berdampak pada kualitas demokrasi kita secara keseluruhan, di mana hak-hak politik warga negara belum terakomodasi secara maksimal dalam perumusan kebijakan strategis nasional. Tayangan ini mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, yaitu bagaimana menciptakan sistem komunikasi politik yang lebih mendengar, mengundang partisipasi kritis, dan menghargai keberagaman suara dari lapisan masyarakat bawah.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa rekomendasi bagi para pemangku kebijakan penyiaran serta para konten kreator di Indonesia. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga penyiaran publik, penting untuk memperbaiki model komunikasi elite-rakyat dengan cara menciptakan format tayangan yang tidak hanya memberi ruang bagi elite berbicara, tetapi juga menyediakan waktu dan ruang bagi masyarakat terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan untuk menyuarakan pandangan mereka. Forum-forum publik, baik di media massa maupun media digital, harus dikembangkan sebagai arena deliberasi yang sehat, inklusif, dan transparan. Praktik-praktik simbolik seperti klaim “telah disetujui DPR” tanpa menjelaskan proses partisipatif yang terjadi, harus dievaluasi karena berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Sementara itu, bagi para konten kreator terutama mereka yang bergerak di bidang jurnalisme independen seperti podcast *Mata Najwa* perlu dipertahankan gaya kritis, investigatif, dan kontekstual dalam membedah isu-isu publik. Namun di sisi lain, pendekatan yang digunakan juga dapat diperluas agar tidak berhenti pada pertanyaan kepada elite, melainkan juga mempertemukan mereka dengan suara publik secara langsung, dalam satu ruang yang setara. Ini akan menjadi kontribusi besar dalam menciptakan budaya komunikasi politik yang lebih partisipatif dan adil. Konten kreator juga diharapkan melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak sosial dari setiap konten yang diproduksi, terutama dalam hal penguatan kapasitas

warga untuk memahami dan terlibat dalam isu-isu kebijakan strategis. Dengan demikian, melalui pembenahan dalam komunikasi politik elite dan penguatan platform media yang berpihak pada warga, diharapkan ke depan demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih substansial, deliberatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya pada kepentingan politik sesaat atau segelintir elite. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berbicara, tetapi juga tentang siapa yang didengarkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada Drs. Subakdi, M.M. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan artikel ini. Terimakasih juga kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama dan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan proyek ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam proyek ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan proyek ini. Akhir kata, penulis berharap semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Jurnal

- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 240-251.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chotimah, H. C., Wibawa, A., Risky, L., & Pratiwi, T. S. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6-10.
- Juliannisa, I. A., Handayani, T. R., Rahmi, R., Riyan, M., Ambarwati, D., Ramadhani, R., ... & Anisa, R. (2022). Pendidikan Dan Bela Negara.
- Kustiawan, W., Liusnimun, T., Hidayat, N., & Wahidin, J. (2022). Komunikator Utama dalam Politik, Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 3(1), 13-22.
- Hamdi, S. M. (2024). Penggunaan Podcast Sebagai Media Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 3(1), 165-170.
- Leksana, R. L., Simatupang, H., & Hartono, D. (2023). STRATEGI PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG OPERASI MILITER SELAIN PERANG DI KABUPATEN BENGKAYANG. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(1), 46
- Rambi, A., Pio, R. J., & Rumawas, W. (2020). Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Kaitannya dengan Turnover Intention. *Productivity*, 1(3), 222-227.
- Rai, I. B., Sila, I. M., & Dewi, I. A. C. (2022). Kepemimpinan wirausaha sinkretisme kepemimpinan pancasila dan kepemimpinan barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5089-5098.
- Saputro, R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan rasa bela negara pada generasi muda di era globalisasi. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 207-211.
- Saragih, R. dan S. A. (2017). Peran Komunikasi Politik Pemerintahan Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana desa. *REFORMASI*, 7(1), 59-69.
- Sari, S. K., & Bayinah, K. (2024). Tindak Tutur Ekspresif dalam Podcast Mata Najwa Berjudul "Enaknya Jadi Laki-laki"(Kajian Pragmatik). *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 1(2), 76-85.
- Siregar, S. K., Rudiyanto, R., Yulianto, B. A., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Pelaksanaan Bela Negara Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 552-559.



- Sudarmoyo, S. (2020). Podcast sebagai alternatif media pembelajaran jarak jauh. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 65-73.
- Tabrani, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan Mentoring Terhadap Motivasi Dalam Melayani. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 1(1), 77-91.
- Wahyudi, E., & Wibawani, S. (2021). Pembentukan sikap rela berkorban mahasiswa melalui mata kuliah patriotisme. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(1), 15-30.

Buku

- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1, pp. 141-154). Englewood Cliffs, NJ: Prentice hall.
- Darji Darmodiharjo dkk.. (1979). *Santiaji Pancasila*, Laboratorium Pancasila.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Komaruddin Hidayat.(2010). *Pendidikan Karakter dalam Kepemimpinan Nasional*. Gramedia.
- Surowidjojo, A. T. (2003). *Hukum, demokrasi & etika: lentera menuju perubahan*.
- Wahjono, S. I. (2022). *Perilaku Kepemimpinan*. Universitas Muhamadiyah Surabaya.